SUARA MERDEKA
Perekat Komunitas Jawa Tengah

SENIN, 11 SEPTEMBER 2017

Kekeringan di Jawa Tengah

Oleh **Alwin Basri**

MUSIM kemarau yang melanda wilayah Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya telah mulai mengancam. Tanpa disertai dengan kebijakan yang antisipatif maka bukan mustahil jika bencana kekeringan akan melanda Jawa Tengah. Terlebih ketika lebih dari separo wilayah Jawa Tengah merupakan rawan bencana kekeringan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 teleh menempatkan 18 wilayah rawan bencana kekeringan yakni di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes.

Dampak dari bencana kekeringan tersebut tentu tidak saja ketahanan pangan yang terancam, namun lebih dari itu adalah penderitaan warga Jawa Tengah akibat kekurangan air sebagai kebutuhan pokok. Efek domino yang kemudian muncul adalah beban ekonomi yang semakin besar .

Sinyalemen terhadap bencana kekeringan tampak dari ketersediaan air di sejumlah waduk dan sungai yang semakin berkurang bahkan kosong. Data dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah menunjukkan dari 41 waduk di Jawa Tengah (9 waduk besar dan 32 waduk kecil) hingga saat ini sudah ada 4 waduk kecil yang kosong (Kedunguling, Gebyar, Botok dan Brambang) dan 13 dalam kondisi susut di antaranya empat di Wonogiri, tiga di Sragen, dua di Pati, satu di Rembang dan Karanganyar. Adapun waduk besar yang menyusut adalah Cacaban Tegal dan Rawapening Kab Semarang.

Untuk kondisi sungai yang benar-benar kering berada di wilayah pantura timur seperti Jepara, Demak, Kudus, Pati, Grobogan, Rembang dan Blora (*Suara Merdeka*, 4/9/2017).

Prediksi bahwa bencana kekeringan belum akan muncul melihat kapasitas air yang tersedia memang tidaklah keliru. Data instansi yang sama bahwa volume air yang tercatat sebanyak 1,1 miliar m3 dari rencana 900 juta m3 serta potensi air diperkirakan mencapai 65 miliar m3 per tahun tetapi yang bisa termanfaatkan baru sekitar 12 miliar m3 dan sisanya terbuang ke laut adalah statistik yang mampu memberikan dukungan terhadap prediksi tersebut. Kapasitas air juga dinilai masih aman untuk irigasi pertanian sehingga potensi terguncangnya ketahanan pangan akibat kekeringan belum menjadi satu kekhawatiran.

Langkah Preventif

Dengan data tersebut penulis melihat bahwa sudah semestinya sedia payung sebelum hujan. Menyiapkan langkah preventif dan antisipatif menghadapi musim kemarau yang berpotensi memunculkan bencana kekeringan. Terlebih melihat efek dari perubahan iklim, awal dan akhir musim menjadi tidak dapat diprediksi secara tepat. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentu kondisi yang demikian sudah dan akan terus dicermati mengingat kondisi yang sama sudah jamak terjadi.

Distribusi air bersih di wilayah-wilayah kekeringan memang penting dipersiapkan dan dilakukan dalam skala pendek. Wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan tentu sebagai prioritas, namun juga perlu di waspadai wilayah baru yang berpotensi terlanda akibat efek perubahan daya dukung lingkungan.

Dalam skala yang lebih panjang tentu adalah fokus kebijakan dan implementasi kebijakan pengembangan wilayah sungai dan daerah resapan air. Pengembangan wilayah sungai yang terdiri atas Wilayah Sungai Pemali Comal, Wilayah Sungai Jratun Seluna, Wilayah Sungai Serayu Bogowonto, Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Wilayah Sungai Citanduy, Wilayah Sungai Progo Opak Serang, Wilayah Sungai Bengawan Solo, Wilayah Sungai Bodri Kuto, Wilayah Sungai Wiso Gelis, dan Wilayah Sungai Karimunjawa semestinya juga terus dilakukan secara optimal. Pada tataran itu perlu ada skala prioritas terhadap wilayah sungai yang memiliki dampak yang terluas. Evaluasi terhadap program-program pengembangan terdahulupun penting untuk dilakukan.

Pembangunan embung perlu memperoleh prioritas pengawasan implementasi agar sesuai dengan rencana. Demikian halnya dengan program pembangunan waduk dan embung yang berasal dari pemerintah pusat maka koordinasi dengan dukungan bersama pemerintah kabupaten/kota diperkuat.

Dalam kondisi yang demikian maka peran serta Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk mengelola air dalam kondisi kemarau menjadi sangat penting. Tidak saja untuk mencegah konflik antarpetani namun juga untuk menjaga ketahanan pangan Jawa Tengah. Pemerintah daerah perlu mendorong dan memfasilitasi penguatan kelembagaan P3A.

Dalam jangka yang lebih panjang adalah membangun budaya masyarakat yang ramah dan penuli terhadap lingkungan. Budaya pemanfaatan air secara bijak perlu dibangun secara konsisten. Upaya ini tentu tidaklah mudah mengingat perubahan paradigma dan kebiasaan masyarakat tidak dapat dilakukan secara instan dan cepat. Diperlukan sinergi dari berbagai instansi dan elemen masyarakat untuk membangun budaya ini. Karenanya pendidikan berwawasan lingkungan menjadi hal mutlak yang harus dikembangkan.(42)

— **Alwin Basri,** *Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, anggota Fraksi PDI Perjuangan*